



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKIP)

TAHUN **2023**



UPT PUSKESMAS  
SITUBONDO

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya UPT Puskesmas Situbondo dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023, walaupun dengan penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini pada dasarnya merupakan amanat dari Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang secara substantif mewajibkan kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai wujud pertanggungjawaban.

Kami sadar bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) di tahun mendatang .

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini bermanfaat bagi UPT Puskesmas Situbondo dan juga pihak-pihak berkepentingan dalam mengevaluasi kinerja UPT Puskesmas Situbondo

Situbondo, 31 Januari 2023  
KEPALA UPT PUSKESMAS  
SITUBONDO

**drg. Hesty Tulus Panggih Arini, MMRS**  
**NIP. 19760702 200903 2 003**

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UPT Puskesmas Situbondo sebagai implementasi sistem akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Kinerja UPT Puskesmas Situbondo atas penyelenggaraan UPT Puskesmas Situbondo. Namun pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas UPT Puskesmas Situbondo.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari UPT Puskesmas Situbondo merupakan bentuk pertanggungjawaban dari Perencanaan Strategik, yang dituangkan dalam bentuk tahapan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja UPT Puskesmas Situbondo.

Pertanggungjawaban suatu Instansi Pemerintah kepada Publik pada prinsipnya merupakan kewajiban Pemerintah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan Pemerintahan, melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan serta fungsi pengawasan publik terhadap jalannya Pemerintahan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban UPT Puskesmas Situbondo untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis UPT Puskesmas Situbondo Tahun 2021 - 2026.

Pengukuran pencapaian kinerja UPT Puskesmas Situbondo dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (Performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (Performance Result) yang dicapai oleh organisasi yang bersangkutan. Hasil pengukuran ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi UPT Puskesmas Situbondo yang sekaligus merupakan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tercantum di RPJMD Kabupaten Situbondo Tahun 2021 – 2026, apabila terjadi perbedaan

antara rencana kinerja dengan realisasinya maka harus dicari penyebabnya dan menentukan strategi untuk mengatasi masalah tersebut.

Tahun 2023 merupakan tahun Kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) UPT Puskesmas Situbondo periode tahun 2021-2026. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) UPT Puskesmas Situbondo.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UPT Puskesmas Situbondo Tahun 2023 ini menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sebagai berikut :

1. Dari seluruh uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara umum UPT Puskesmas Situbondo telah memperlihatkan pencapaian sasaran sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategisnya.
2. Indikator Kinerja pada tahun 2023 ada 3 (tiga ) indikator kinerja yang tercapai yaitu capaian SPM (Standart Pelayanan Minimal); capaian PKP tahun 2023 ( nilai 91, ) dan capaian IKM Puskesmas,.
3. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) UPT Puskesmas Situbondo periode tahun 2021-2026 yang secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan baik

Keberhasilan dan kekurangan yang telah dicapai selama tahun 2023 telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi UPT Puskesmas Situbondo untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Dalam rangka peningkatan kinerjanya, pelaksanaan program dan kegiatan UPT Puskesmas Situbondo untuk Rencana Strategis (Renstra) yang akan datang yaitu tahun 2021- 2026 akan difokuskan pada sasaran dan indikator yang telah ditetapkan, terutama Indikator Kinerja Utama dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>1</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>4</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>5</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>6</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>7</b>
1.1 Latar Belakang.....	7
1.2 Landasan Hukum.....	8
1.3 Maksud dan Tujuan .....	9
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi .....	10
1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	10
1.4.2 Kondisi Geografis.....	11
1.4.3 Wilayah Administrasi.....	12
1.4.4 Kependudukan .....	12
1.4.5 Perekonomian.....	13
1.4.6 Pendidikan .....	14
1.5 Struktur Organisasi .....	14
1.5.1 Struktur Organisasi.....	14
1.6 Sumber Daya UPT Puskesmas Situbondo .....	17
1.7 Sistematika Penyajian .....	18
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>19</b>
2.1 Renstra UPT Puskesmas Situbondo Tahun 2021 – 2026.....	19
2.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	19
2.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Puskesmas Situbondo .....	23
2.4 Telaah Renstra K/L dan Renstra Puskesmas Situbondo .....	26
2.5 Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup....	31
2.6 Penentuan Isu-isu Strategis/Program Prioritas.....	31
2.7 Rencana Strategis UPT Puskesmas situbondo.....	33
2.7.1 Tujuan dan Sasaran .....	33
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>37</b>
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja .....	37
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>47</b>
4.1 Kesimpulan .....	47
4.2 Saran .....	47

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Puskesmas Situbondo.....	16
Gambar 2. 1 Cascading Renstra Puskesmas Situbondo.....	35

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Permasalahan Pelayanan Puskesmas Situbondo .....	20
Tabel 2.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan UPT Puskesmas Situbondo terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Situbondo .....	25
Tabel 2.3 Permasalahan Pelayanan Puskesmas Situbondo Kabupaten Situbondo Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	29
Tabel 2.4 Permasalahan Pelayanan Puskesmas berdasarkan Analisis RTRW dan KLHS .....	31
Tabel 2.5 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis .....	32
Tabel 2.6 Nilai Skala Kriteria.....	32
Tabel 2.7 Target Indikator Tujuan Dan Target Indikator Sasaran Puskesmas Situbondo .....	34
Tabel 2.8 Target Indikator Tujuan Dan Target Indikator Sasaran Puskesmas Situbondo .....	34
Tabel 3.1 Capaian SPM Puskesmas Situbondo Tahun 2023 .....	37
Tabel 3.2 Capaian PKP UKM Esensial Puskesmas Situbondo Tahun 2023.....	38
Tabel 3.3 Capaian PKP UKM Pengembangan Puskesmas Situbondo Tahun 2023 .....	43
Tabel 3.4 Capaian PKP UKM Pengembangan Puskesmas Situbondo Tahun 2023 .....	45

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan. Kesemuanya harus terangkum dalam dokumen Laporan Kinerja. Laporan Kinerja merupakan laporan pertanggungjawaban instansi pemerintah atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik untuk mewujudkan good governance.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Laporan Kinerja UPT Puskesmas Situbondo Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026. Target kinerja yang harus dicapai UPT Puskesmas Situbondo Tahun 2023, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) UPT Puskesmas Situbondo Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah Kabupaten Situbondo dalam hal ini UPT Puskesmas Situbondo dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja yang ada di lingkungan Puskesmas. Penyusunan Laporan Kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja program kesehatan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya serta dapat menjadi masukan dan umpan balik untuk perbaikan kinerja Puskesmas

pada tahun mendatang.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

12. PermenPANRB No.89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah serta akan dilakukan Penilaian SAKIP OPD tingkat Kabupaten dan Nasional.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kabupaten Situbondo Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2021 tentang tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;
17. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 34 Tahun 2023 Tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT Puskesmas Situbondo;
18. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 adalah:

1. Menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
2. Mewujudkan keterpaduan arah kebijakan dan strategi serta keselarasan program dan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis UPT Puskesmas Situbondo tahun 2021-2026;

3. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahun berikutnya yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) UPT Puskesmas Situbondo dan rencana kerja lima tahunan;
4. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil UPT Puskesmas Situbondo dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan kepada masyarakat;
5. Mewujudkan perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas Kabupaten Situbondo di bidang kesehatan;
6. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrument pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan dalam tahun berikutnya;
7. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana Kerja program/kegiatan UPT Puskesmas Situbondo dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di daerah.

## **1.4 Tugas Pokok dan Fungsi**

### **1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Peraturan Bupati nomor 17 tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Puskesmas Situbondo Kecamatan Situbondo, pada Bab 3 Pasal 3 ayat 3, menyebutkan bahwa Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas Situbondo.

Pada pasal 4, menyebutkan Puskesmas mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas Situbondo untuk menyelenggarakan Upaya Kesehatan secara holistik menyeluruh dan terpadu untuk mencapai kemampuan hidup sehat agar terwujud derajat kesehatan yang optimal. Pada pasal 5 menyebutkan : bahwa untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam pasal 4, puskesmas mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat ;
- b. Pemberian pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat yang berupa Upaya Kesehatan Masyarakat(UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
- c. Pemberian motivasi kepada masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalam bidang kesehatan ;

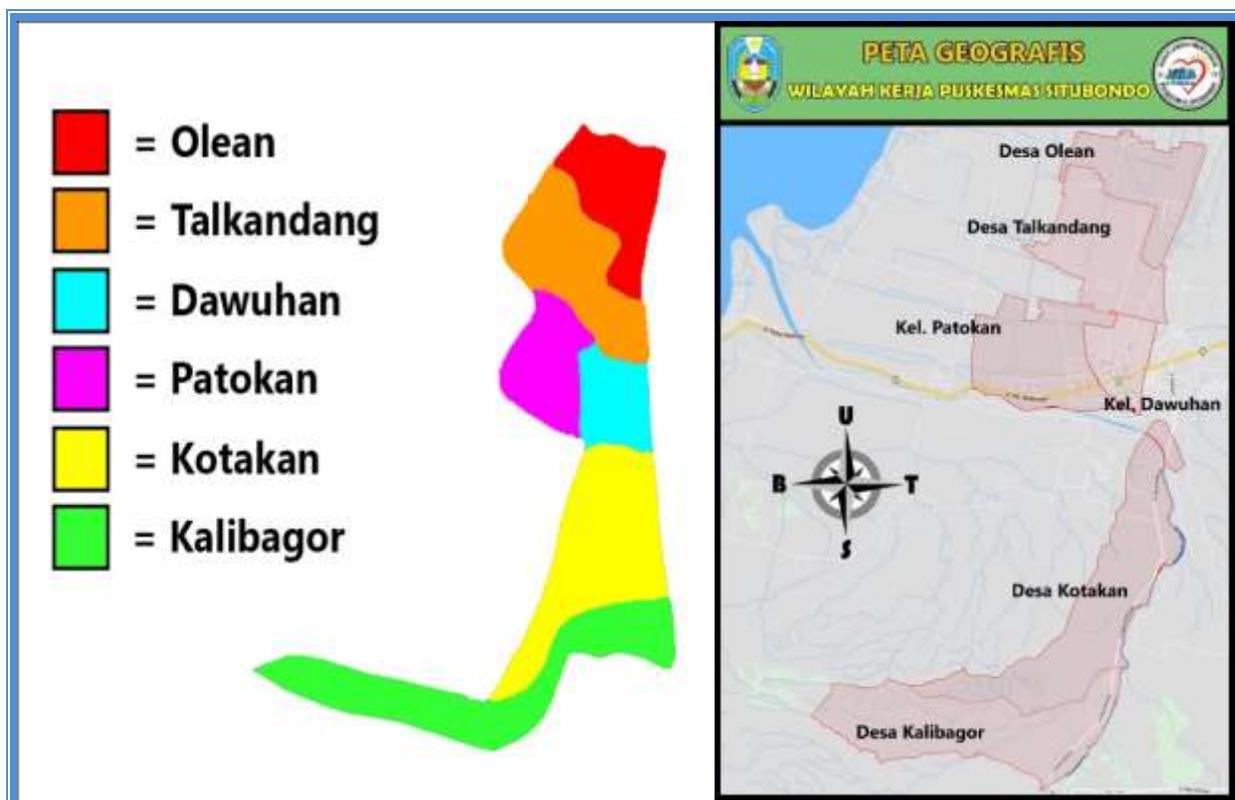
- d. Pemberian petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggali dan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien dalam bidang kesehatan ;
- e. Pemberian bantuan yang bersifat bimbingan teknis materi dan rujukan medis maupun rujukan kesehatan kepada masyarakat ;
- f. Pelaksana program promotif dan preventif terkait program kesehatan ;
- g. Pengadaan kerjasama dengan sektor – sektor yang bersangkutan , swasta, LSM, dan lain - lain dalam melaksanakan program Puskesmas di wilayah kerjanya.

### 1.4.2 Kondisi Geografis

Kecamatan Situbondo adalah salah satu kecamatan yang berada di pusat kota Kecamatan Situbondo. dengan batas wilayah:

- ❖ Sebelah utara : Kecamatan Mangaran
- ❖ Sebelah timur : Kecamatan Panjii
- ❖ Sebelah selatan : Kabupaten Bondowoso
- ❖ Sebelah barat : Kecamatan Panarukan

**Grafik 1.1 Peta Kecamatan Situbondo**



Sumber : Profil Kecamatan Situbondo 2023

Luas Kecamatan Situbondo adalah 27,57 km<sup>2</sup> atau 2.757 Ha, dan bentuknya memanjang dari utara ke selatan kurang lebih 13 Km. Wilayah Kecamatan Situbondo umumnya sebelah utara merupakan dataran rendah

dan di sebelah selatan merupakan dataran tinggi dengan rata-rata dataran rendah kurang lebih 83 % dan dataran tinggi kurang lebih 17 %.

Dari 17 kecamatan yang ada, Kecamatan Situbondo adalah salah satu kecamatan yang tidak memiliki pantai dan Kecamatan Situbondo berada pada ketinggian 0 – 1.250 m diatas permukaan laut. (Sumber: Profil Kecamatan Situbondo 2023)

### **1.4.3 Wilayah Administrasi**

Wilayah administrasi di Kecamatan Situbondo terbagi menjadi :

- ❖ Desa/Kelurahan : 4 Desa/2 Kelurahan
- ❖ Dusun/Lingkungan : 27 dusun/lingkungan
- ❖ Rukun Warga (RW) : 67 RW
- ❖ Rukun Tetangga (RT) : 242 RT

Jumlah RT terbanyak berada di Kelurahan Patokan, yaitu sebanyak 72 RT dan yang paling sedikit jumlah RT di Desa Kalibagor, yaitu sebanyak 17 RT. Dari 6 wilayah yang ada, terdapat 2 Kelurahan yang berada di pusat kota yaitu Kelurahan Patokan dan Kelurahan Dawuhan.

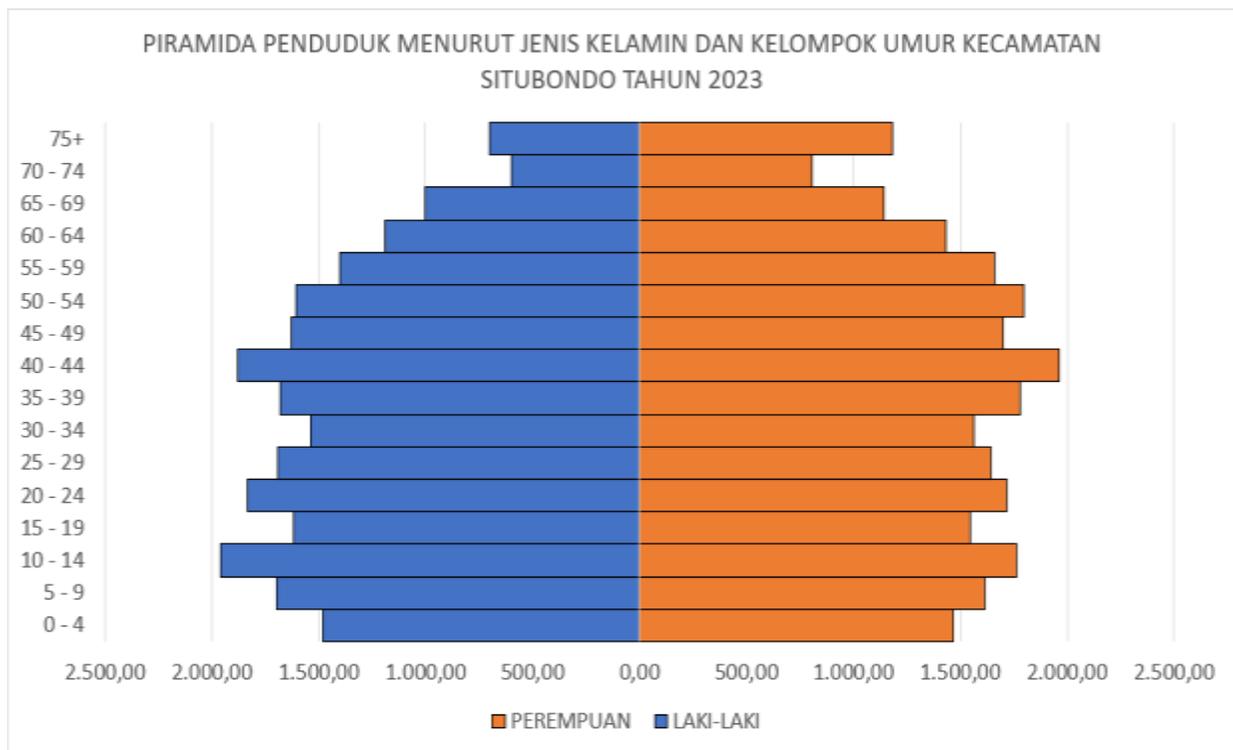
### **1.4.4 Kependudukan**

Data kependudukan merupakan salah satu data pokok yang sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan karena penduduk selain merupakan obyek juga merupakan subyek pembangunan.

Berdasarkan hasil Data dari Catatan Sipil, jumlah penduduk Kecamatan Situbondo pada tahun 2023 mencapai 48.028 jiwa yang terdiri dari 21.261 penduduk laki-laki dan 26.767 penduduk perempuan dengan luas wilayah 27,57 Km<sup>2</sup>. Sedangkan jumlah rumah tangga di Kecamatan Situbondo adalah 19.951 Ruta, sehingga rata-rata penduduk per rumah tangga adalah 2,41.

Jumlah penduduk yang tersebar di Wilayah Kecamatan Situbondo, jumlah penduduk terbanyak adalah Kelurahan Dawuhan (14.526 jiwa). Sedangkan jumlah penduduk terkecil adalah Desa Kalibagor (3.083 jiwa). Komposisi Penduduk Menurut Golongan Umur Kecamatan Situbondo Tahun 2023 dapat dilihat pada Grafik 1.2 berikut.

**Grafik 1.2 Piramida Penduduk Menurut Golongan Umur Kecamatan Situbondo Tahun 2023**



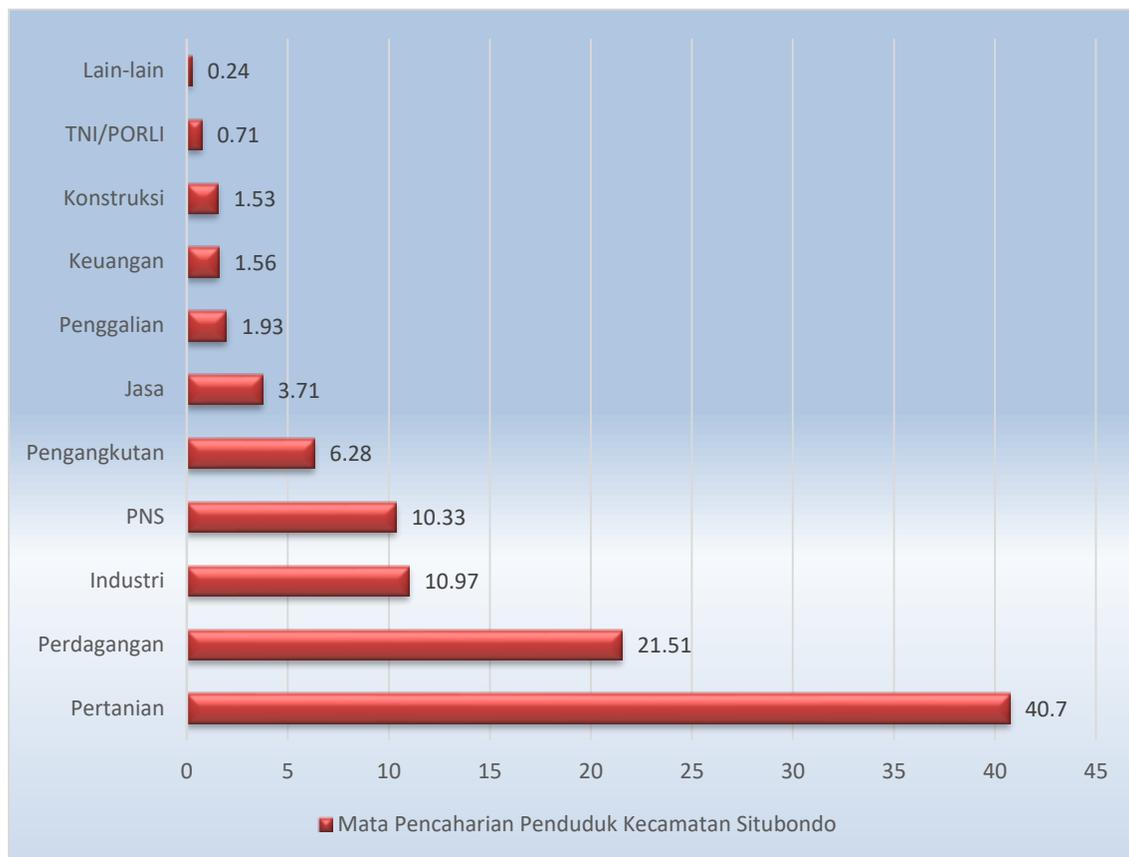
Sumber : Kecamatan Situbondo

Dari grafik piramida di atas diketahui bahwa komposisi penduduk terbesar adalah kelompok umur 25-29 tahun. Sedangkan komposisi penduduk paling sedikit adalah kelompok usia 60-69 tahun. Berdasarkan data maka piramida yang terbentuk di Kecamatan Situbondo adalah jenis piramida stasioner yaitu mengGrafikkan bahwa daerah dengan pertumbuhan penduduk yang stabil. kelompok kependudukan yang lebih detail dapat dilihat di Lampiran Data Profil Kesehatan Tabel 2.

#### 1.4.5 Perekonomian

Dari sisi mata pencaharian penduduk maka mayoritas penduduk di Kecamatan Situbondo adalah bekerja di sektor pertanian sebanyak 40,70 %, sedangkan sektor lainnya berturut turut adalah perdagangan 21,51 %, industri 10,97 %, PNS 10,33 %, pengangkutan 6,82 %, Jasa 3,71 %, Penggalian 1,93 %, bank dan lembaga keuangan 1,56 %, konstruksi 1,53 %, TNI/POLRI 0,71 %, dan sektor listrik, gas dan air minum 0,24 %.

**Grafik 1.3 Piramida Penduduk Menurut Golongan Umur Kecamatan Situbondo Tahun 2023**



#### 1.4.6 Pendidikan

Dilihat dari jumlah lembaga yang ada maka perkembangan pendidikan untuk semua tingkatan tidak mengalami perubahan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 maka pada tahun 2023 jumlah murid untuk tiap tingkat dapat dirinci sebagai berikut: murid TK menunjukkan peningkatan sebesar 11,5 persen, murid SD ada penurunan sebesar 4,75 persen, murid SMP turun sebesar 3,64 persen, murid SMA naik sebesar 7,8 persen dan murid SMK turun sebesar 1,17 persen. Terjadi sedikit penurunan jumlah siswa SD, SMP dan SMK tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 (data dari buku Kecamatan Situbondo dalam angka tahun 2023).

### 1.5 Struktur Organisasi

#### 1.5.1 Struktur Organisasi

Susunan organisasi UPT Puskesmas Situbondo sebagaimana dimaksud terdiri dari

- a. Kepala Puskesmas membawahi JFT/JFU
- b. JFT/JFU ditunjuk sebagai Penanggung Jawab dari koordinator :
  - b.1 PJ ADMEN
    - b.1.1 Koordinator Tim Manajemen PKM

- b.1.2 Koordinator Sistem Informasi PKM
- b.1.3 Koordinator Kepegawaian
- b.1.4 Koordinator Keuangan
- b.1.5 Koordinator Rumah Tangga
- b.2 PJ UKM ESSENSIAL
  - b.2.1 Koordinator Promkes
  - b.2.2 Koordinator KIA
  - b.2.3 Koordinator Gizi
  - b.2.4 Koordinator Kesehatan Lingkungan
  - b.2.5 Koordinator Penanganan Penyakit
  - b.2.6 Koordinator Perkesmas
  - b.2.7 Koordinator Lansia
- b.3 PJ UKM PENGEMBANGAN
  - b.3.1 Koordinator Kesehatan Gigi Masyarakat
  - b.3.2 Koordinator Kestrad
  - b.3.3 Koordinator Olahraga
  - b.3.4 Koordinator UKK
  - b.3.5 Koordinator Jiwa
  - b.3.6 Koordinator Kes Matra
- b.4 PJ UKP KEFARMASIAN DAN LABORATORIUM
  - b.4.1 Koordinator pelayanan pemeriksaan umum
  - b.4.2 Koordinator Pelayanan Gigi dan Mulut
  - b.4.3 Koordinator Pelayanan KIA
  - b.4.4 Koordinator Pelayanan Gizi
  - b.4.5 Koordinator Pelayanan Laboratorium
  - b.4.6 Koordinator Pelayanan Farmasi
  - b.4.7 Koordinator Pelayanan Tindakan dan Kegawatdaruratan
- b.5 PJ BANGUNAN ,PRASARANA DAN PERALATAN
  - b.5.1.Koordinator Bangunan
  - b.5.2 Koordinator Prasarana
  - b.5.3 Koordinator Peralatan
- b.6 PJ JEJARING DAN JARINGAN
  - b.6.1 Koordinator Puskesmas Keliling
  - b.6.2 Koordinator Praktik Bidan
  - b.6.3 Koordinator Jejaring
  - b.6.4 Koordinator Puskesmas Pembantu
    - b.6.4.1 Sub Koordinator Pustu Patokan

- b.6.4.2 Sub Koordinator Poskenkel Dawuhan Dam
- b.6.4.3 Sub Koordinator Poskenkel Dawuhan Krajan
- b.6.4.4 Sub Koordinator Ponkesdes Talkandang
- b.6.4.5 Sub Koordinator Pustu Kalibagor
- b.6.4.6 Sub Koordinator Pustu Olean

b.7 PJ MUTU

- b.7.1 Koordinator Mutu Admen
- b.7.2 Koordinator Mutu UKM
- b.7.3 Koordinator Mutu UKP
- b.7.4 Koordinator PPI
- b.7.5 Koordinator Audit Internal
- b.7.6 Koordinator MFK dan K3
- b.7.7 Koordinator Manajemen Risiko dan Keselamatan Pasien

1.5.2 Gambar Struktur Organisasi

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Puskesmas Situbondo



1.5.3 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok JF mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Kelompok JF terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang

keahliannya.

- b. Kelompok JF dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.

### 1.6 Sumber Daya UPT Puskesmas Situbondo

Kepegawaian (Sumber Daya Manusia) merupakan faktor penting dalam pencapaian tugas pokok dan fungsi Puskesmas Situbondo. Jumlah SDM di UPT Puskesmas Situbondo sebanyak 73 orang, dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Distribusi Sumber Daya Manusia sesuai dengan tingkat pendidikannya**

NO	PENDIDIKAN	STATUS KEPEGAWAIAN		
		PNS	PPPK	MAGANG/ KONTRAK
1	S - 2	1		
2	Kedokteran Umum	1		
3	Kedokteran Gigi	3		
4	Apoteker / Asisten Apoteker	3		
5	SKM	2		1
6	D III Keperawatan	2	1	5
7	S1 Keperawatan	2	1	4
8	D III Gizi	1		
9	D IV Gizi	1	1	
10	S1 Kesling	1		
11	D III Kebidanan	6	1	7
12	D IV Kebidanan	3		2
13	D III Perawat Gigi		1	
14	D III Lab Kesehatan	1		
15	D4 Rekam Medik			2
16	S - 1	1		9
17	SMA	5		5
JUMLAH		33	5	35

**Tabel 1.2 Keadaan SDM Kesehatan di Puskesmas Situbondo Tahun 2023**

No.	Jenis SDM	Status Kepegawaian				Jumlah
		PNS	Kontrak	PKKK	Magang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kepala Puskesmas	1				1
	Ka.Sub.Bag TU	1				1
	Dokter Umum	1				1
	Dokter Gigi	2				2
	Perawat	4	1	2	8	15

No.	Jenis SDM	Status Kepegawaian				Jumlah
		PNS	Kontrak	PKKK	Magang	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Perawat Gigi			1		1
	Bidan	9		1	9	19
	Kefarmasian / AA	3				3
	Sanitasi	1				1
	Gizi	2		1		3
	Ahli Teknologi Lab Medik	1				1
	Epidemiolog		1			1
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	2				2
	Perekam Medis				2	2
	Bendahara	1				1
	Penata Laporan Keuangan		1			1
	Pranata Komputer				2	2
	Pengadministrasi Umum	4			9	13
	Pengadministrasi Kepegawaian	1				1
	Pengemudi Ambulans		1		1	2
	Jumlah	33	4	5	30	73

### 1.7 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja UPT Puskesmas Situbondo Tahun 2023 terdiri dari beberapa bagian, yakni sebagai berikut :

#### **Bab 1 : Pendahuluan**

Bab ini berisi penjelasan tentang Latar belakang, Landasan hukum, maksud dan tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Kondisi Kepegawaian dan Sistematika Penyajiannya.

#### **Bab 2 : Perencanaan dan Indikator Sasaran Puskesmas**

Bab ini berisi penjelasan Rencana Strategis 2021 – 2026 yang menjelaskan tentang isu-isu strategis yang akan berkembang selama 5 tahun dan indikator Sasaran Puskesmas.

#### **Bab 3 : Akuntabilitas Kinerja**

Bab ini berisi penjelasan capaian kinerja melalui SPK dan PKP

#### **Bab 4 : Penutup**

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran

#### **Lampiran – lampiran**

## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

### **2.1 Renstra UPT Puskesmas Situbondo Tahun 2021 – 2026**

Gambaran kinerja pelayanan kesehatan oleh UPT Puskesmas Situbondo dapat diketahui dari dua hal yakni tingkat derajat kesehatan masyarakat, capaian program pelayanan kesehatan terhadap Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, pembiayaan kesehatan, sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan, sediaan farmasi dan manajemen pelayanan kesehatan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Puskesmas Situbondo dan Renstra UPT Puskesmas Situbondo menunjukkan bahwa tantangan yang perlu ditindaklanjuti adalah:

1. Upaya penanganan Covid-19 dan Vaksinasi Covid-19;
2. Upaya intensif dalam penurunan AKI dan AKB;
3. Upaya intensif dalam penurunan *stunting*;
4. Upaya dalam pengendalian penyakit menular (TB dan HIV);
5. Upaya dalam pengendalian penyakit tidak menular (DM dan HT);
6. Upaya dalam peningkatan pelayanan baik akses maupun kualitas layanan pada masyarakat.

Adapun pengembangan pelayanan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan antara lain:

1. Peningkatan dan pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Pelayanan kesehatan Sehati;
3. Pengembangan aplikasi SIMESSEM dalam mempermudah layanan kesehatan; dan
4. Pengoptimalan PSC 119

### **2.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan**

- a. Masih adanya angka kematian ibu dan bayi
- b. Penurunan angka *stunting*
- c. Adanya Pandemi Covid-19
- d. Angka penyakit tidak menular tinggi (DM dan HT)
- e. Angka kasus penyakit menular (TB dan HIV/AIDS)
- f. Sarana dan prasaran yang belum standar

Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tertuang dalam matrik sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Permasalahan Pelayanan Puskesmas Situbondo**

<b>No (1)</b>	<b>Masalah (2)</b>	<b>Pokok Masalah (3)</b>	<b>Akar Masalah (4)</b>
1.	Status Kesehatan Ibu, Bayi, Balita yang masih rendah.	Masih Adanya Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, dengan data tahun 2020 kematian ibu 2, tahun 2021 sebanyak 6. Sedangkan untuk kematian bayi tahun 2020 10, tahun 2021 sebanyak 15	1. SDM : - Kompetensi kurang memadai - Jumlah tenaga medis yang kurang 2. Sarana dan prasarana belum memadai 3. Adanya pernikahan dini 4. Adanya ibu hamil yang tidak menetap di wilayah kerja Puskesmas 5. Masa pandemic covid 19 6. Sosialisasi standar prosedur operasional kurang optimal 7. Masih terbatasnya dukungan lintas sektor dalam upaya penurunan AKI dan AKB
2	Status balita stunting masih tinggi	Masih adanya Balita Stunting. Data kasus balita stunting tahun 2020 151 ditahun 2021 302	1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif. 2. Kurangnya peran lintas sektor dan tokoh masyarakat dalam mengkampanyekan pentingnya ASI

<b>No</b>	<b>Masalah</b>	<b>Pokok Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
			<p>eksklusif.</p> <p>3. Pemberian makanan bagi bayi dan anak tidak sesuai rekomendasi.</p> <p>4. Distribusi Tablet Tambah Darah Rematri ke sekolah MTs dan MA terhambat karena masa pandemi COVID-19</p> <p>5. Tingginya kasus anemia pada ibu hamil.</p>
3.	Meningkatnya Angka Kesakitan	Adanya Pandemi Covid-19 dan kurang optimalnya pelaksanaan vaksinasi Covid-19	<p>1. Perilaku masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan kurang</p> <p>2. Perilaku masyarakat dalam penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masih rendah.</p> <p>3. Kurang kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19</p>
4.	Meningkatnya angka kesakitan penyakit tidak menular	<p>Angka penyakit tidak menular tinggi (DM dan HT). Dengan data kasus DM tahun 2020 1173 kasus dan tahun 2021 1073 kasus. Sedangkan data kasus HT tahun 2020 2892</p>	<p>1. Pola konsumsi masyarakat tidak sesuai prinsip isi piringku dan gizi seimbang</p> <p>2. Kurangnya aktifitas fisik</p> <p>3. Masih tingginya kebiasaan merokok</p> <p>4. Kurangnya kesadaran</p>

<b>No</b>	<b>Masalah</b>	<b>Pokok Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
		kasus dan tahun 2021 5200 kasus	masyarakat untuk melakukan cek kesehatan secara berkala
5.	Meningkatnya angka kesakitan penyakit menular	Angka penyakit menular (TB dan HIV) yang masih tinggi. Dengan data kasus TB tahun 2020 66 kasus dan tahun 2021 65 kasus. Sedangkan data kasus HIV tahun 2020 15 kasus, meninggal 1 dan tahun 2021 14 kasus, meninggal 1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perilaku batuk tidak sesuai etika batuk</li> <li>2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dahak</li> <li>3. Masih adanya kelompok potensial penularan HIV</li> </ol>
6.	Mutu layanan yang belum optimal	Sarana dan prasarana yang belum standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya/terbatasnya lahan untuk pemenuhan standar puskesmas</li> <li>2. Masih belum terpenuhinya sarana prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar</li> <li>3. Perkembangan sistem informasi dan teknologi di bidang pelayanan kesehatan.</li> </ol>

### **2.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Puskesmas Situbondo**

Visi pembangunan daerah Kabupaten Situbondo tahun 2021 - 2026 mengacu pada visi yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo. Visi pembangunan Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

#### **“Mewujudkan Masyarakat Situbondo Yang Berakhlak, Sejahtera, Adil dan Berdaya”**

Visi Pembangunan Kabupaten Situbondo ini menjadi arah cita-cita pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Situbondo dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Situbondo pada tahun 2021 - 2026. Secara filosofis visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

#### **1. Berakhlak**

Akhlak adalah nilai-nilai dasar yang membimbing seseorang dalam berperilaku. Seorang dikatakan berakhlak atau bermoral, apabila perilakunya mengikuti kaidah-kaidah kehidupan yang dikehendaki atau dibenarkan oleh agama, masyarakat, dan hati nuraninya. Moral atau akhlak, tidak dapat diukur semata-mata oleh diri sendiri, tetapi oleh lingkungan dan masyarakatnya. Oleh karena pada dasarnya membangun akhlak adalah membangun Sumber Daya Manusia serta membangun Masyarakat yang Unggul. Dalam konteks pembangunan, akhlak itu penting dalam memahami pembangunan yang akan saya jalankan kedepan yang dapat diterjemahkan dalam 4 prinsip sebagai berikut:

- a) Pembangunan yang didasari oleh akhlak dijalankan dengan Prinsip pembangunan yang mengedepankan kepentingan bersama dengan didasari upaya untuk mengoptimalkan kemaslahatan Bersama bukan pembangunan yang diraih dengan mengorbankan Sebagian besar untuk menguntungkan sebagian kecil masyarakat.
- b) Pembangunan yang di dasari akhlak dijalankan dengan Prinsip pembangunan pembangunan yang dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan garis norma kehidupan bernegara dan beragama bukan pembangunan yang menghalalkan segala cara diluar koridor yang digariskan oleh negara dan agama.
- c) Pembangunan yang didasari akhlak dijalankan dengan Prinsip pembangunan dalam rangka mengasihkan SDM yang berkualitas dan Unggul yang disertai dengan Iman (karakter nilai) serta kemampuan

daya pikir kritis, kreatifitas dan ketrampilan teknologi informasi yang mampu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat sekitarnya.

- d) Pembangunan yang didasari akhlak dijalankan dengan pembangunan yang tidak keluar dari nilai nilai kemanusiaan dan pembangunan yang tidak merusak lingkungan dan alam.

## **2. Sejahtera**

Masyarakat sejahtera adalah kondisi masyarakat dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat atau damai. Kondisi ini dapat diciptakan jika didasari dengan kualitas kebijakan dari pemerintah karena mencapai masyarakat yang sejahtera ini adalah kewajiban pemerintah yang tak bisa ditawartawar lagi.

## **3. Adil**

Adil dalam artian adalah:

- a) Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat
- b) Keberpihakan Pemerintah Terhadap Akses Ekonomi Masyarakat.

## **4. Berdaya**

Masyarakat berdaya adalah masyarakat yang mampu memanfaatkan semua potensi kekuatan yang ada di dalam dirinya dan di sekitarnya. Kekuatan itu dimanfaatkan untuk membuat mereka tidak bergantung kepada masyarakat lainnya. Masyarakat berdaya mampu untuk menjadikan skill, kemampuan, keterampilan, kreatifitas sebagai modal dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Mereka melihat sumber daya yang ada dalam dirinya sebagai landasan dalam melangsungkan kehidupannya, agar tidak menjadi beban bagi pihak lain.

Masyarakat berdaya senantiasa berusaha memahami situasi perubahan-perubahan yang ada di sekitarnya baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Perubahan-perubahan itu dimanfaatkan untuk melakukan pengembangan diri. Masyarakat berdaya mampu untuk menjadikan skill, kemampuan, keterampilan, kreatifitas sebagai modal dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Mereka melihat sumber daya yang ada dalam dirinya sebagai landasan dalam melangsungkan kehidupannya, agar tidak menjadi beban bagi pihak lain. Masyarakat berdaya senantiasa berusaha memahami situasi perubahan-perubahan yang ada di sekitarnya baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Perubahan-perubahan itu dimanfaatkan untuk melakukan pengembangan diri.

Usaha-usaha untuk mewujudkan Visi Kabupaten Situbondo 2021 - 2026 akan dijabarkan dalam Misi pembangunan Kabupaten Situbondo tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

1. Membangun Masyarakat Situbondo Beriman dalam Keberagaman;
2. Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas dan Meningkatkan Peran Perempuan
3. Membangun Infrastruktur, Ekonomi Berkeadilan dan Berdaya Saing
4. Membangun Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Tangguh

Berdasarkan Visi, Misi dan Program, Bupati Situbondo dalam RPJMD 2021 - 2026, maka Puskesmas Situbondo menindaklanuti Visi: “Mewujudkan Masyarakat Situbondo Yang Berakhlak, Sejahtera, Adil dan Berdaya”.. Utamanya Misi II yaitu Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas dan Meningkatkan Peran Perempuan. Kemudian dijabarkan dalam faktor penghambat dan pendorong sesuai dengan tupoksi Puskesmas Situbondo sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan UPT Puskesmas Situbondo terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Situbondo**

Visi : <b>“Mewujudkan Masyarakat Situbondo Yang Berakhlak, Sejahtera, Adil dan Berdaya”.</b>				
Misi II : <b>“Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas dan Meningkatkan Peran Perempuan”.</b>				
No	Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo	Permasalahan Pelayanan Puskesmas Situbondo	Sebagai Faktor	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas, dan Meningkatkan Peran Perempuan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih adanya angka kematian ibu dan bayi</li> <li>2. Penurunan angka stunting</li> <li>3. Adanya Pandemi Covid-19</li> <li>4. Angka penyakit tidak menular tinggi (DM dan HT)</li> <li>5. Angka kasus penyakit menular (TB dan HIV/AIDS)</li> <li>6. Sarana dan prasarana yang</li> </ol>	<p><b>INTERNAL :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya tenaga kesehatan yang terlatih tata laksana program kesehatan</li> <li>2. Puskesmas Situbondo bukan kategori pelayanan PONEB</li> <li>3. Kompetensi Petugas terhadap Skill masih rendah</li> <li>4. Terbatasnya</li> </ol>	<p><b>INTERNAL :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen Puskesmas memiliki program kerja dan struktur organisasi</li> <li>2. Puskesmas sudah terakreditasi FKTP</li> <li>3. Puskesmas sudah berstatus badan layanan umum daerah (BLUD)</li> <li>4. Pelayanan yang diberikan</li> </ol>

Visi : <b>“Mewujudkan Masyarakat Situbondo Yang Berahlak, Sejahtera, Adil dan Berdaya”.</b>				
Misi II : <b>“Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas dan Meningkatkan Peran Perempuan”.</b>				
No	Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo	Permasalahan Pelayanan Puskesmas Situbondo	Sebagai Faktor	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
		belum standar	<p>petugas untuk melakukan skrining</p> <p>5. Terbatasnya lahan puskesmas sehingga beberapa ruang tidak sesuai standar</p> <p><b>EKSTERNAL :</b></p> <p>1. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk datang menimbang bayi dan balita</p> <p>2. Tindak lanjut hasil koordinasi lintas sektor belum optimal</p>	<p>maksimal dari tenaga kesehatan ( mengenai penyampaian informasi )</p> <p>5. Pelayanan yang diberikan cukup maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai masalah kesehatan</p> <p><b>EKSTERNAL :</b></p> <p>1. Adanya dukungan dari Lintas Sektor</p> <p>2. Kemitraan strategis pihak ketiga, organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi</p> <p>3. Permenkes 75 th 2014 ttg Puskesmas</p> <p>4. Permenkes 46 tahun 2015 ttg Akreditasi FKTP</p>

## 2.4 Telaah Renstra K/L dan Renstra Puskesmas Situbondo Situbondo

### a. Berdasarkan Arah Kebijakan RPJMN 2021 - 2026 :

1. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial
3. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
4. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas
5. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda

6. Pengentasan Kemiskinan
7. Peningkatan produktivitas dan daya saing

Dengan Arah kebijakan RPJMN Bidang Kesehatan 2021 – 2026 yakni :

Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.

**Dengan Strategi RPJMN 2021 – 2026 :**

1. Peningkatan Kesehatan Ibu , anak , KB dan kesehatan reproduksi
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat
3. Peningkatan Pengendalian Penyakit
4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ( Germas)
5. Penguatan Sistem Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan

**b. Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan :**

1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer ( *Primary Health Care* ) :
  - 1) Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas
  - 2) Peningkatan SDM
  - 3) Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen Puskesmas
  - 4) Peningkatan Pembiayaan
  - 5) Peningkatan Sistem Informasi
2. Pelayanan Kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, dan intervensi secara kontinyum (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif
3. Penguatan pencegahan faktor resiko, deteksi dini, dan aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS) guna pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.
4. Penguatan sistem kesehatan disemua level pemerintahan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai cakupan kesehatan semesta
5. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah untuk menuju korvengensi  
dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas termasuk integrasi lintas program dengan pendekatan keluarga ( PIS PK)

**c. Arah Kebijakan Puskesmas Situbondo Kabupaten Situbondo**

1. Penurunan AKI dan AKB
2. Penataan Jaminan Kesehatan Nasional (sistem rujukan)
3. Penurunan Prevalensi stunting

4. Penyakit Menular dan Tidak Menular
5. Penggerakan Taman Posyandu
6. Pemerataan tenaga kesehatan strategis

**d. Arah Kebijakan Puskesmas Situbondo kabupaten Situbondo**

1. Peningkatan sosialisasi tentang program kesehatan promotif preventif bagi masyarakat
2. Pemberdayaan masyarakat dalam penanganan masalah kesehatan (penurunan AKI – AKB, stunting dan Penyakit Menular dan Tidak Menular )
3. Koordinasi kemitraan dengan organisasi profesi, LSM dan Institusi Pendidikan
4. Peningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dalam pengelolaan program kesehatan (Pelatihan, seminar, training, workshop, bimbingan teknis sesuai standar kompetensi dan kewenangan profesi Nakes Mandiri/Kebijakan In House Training/Pemberdayaan pelatihan oleh organisasi profesi contoh : P2KS)
5. Mengoptimalkan RPG ( Rumah Pemulihan Gizi )
6. Sinkronisasi perencanaan pengembangan sarana, prasarana, peralatan, obat, alkes dan tenaga pada fasilitas kesehatan Rumah Sakit Puskesmas, Pustu dan Ponkesdes
7. Pembinaan dan Pengawasan Standarisasi Pelayanan Medis Pelayanan Masalah Kesehatan
8. Optimalisasi tata laksana kematian ibu dan bayi disemua jenjang pelayanan kesehatan
9. Optimalisasi tata laksana dalam Akselerasi perbaikan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gizi buruk dan stunting
10. Advokasi ke Pemerintah Daerah terkait penganggaran Dokter spesialis/mengikutsertakan program PDBSBK
11. Advokasi ke Pemerintah Daerah tentang Standar Pelayanan Kesehatan, dan program pembiayaan kesehatan sarana, prasarana, peralatan, obat, alkes dan tenaga pada fasilitas kesehatan Rumah Sakit Puskesmas, Pustu dan Ponkesdes

Dari empat arah kebijakan diatas, sudah sesuai dengan permasalahan isu strategis dan arah kebijakan Puskesmas Situbondo Situbondo. Dan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Puskesmas Situbondo Kab. Situbondo tidak lepas dari kebijakan yang diluncurkan oleh Kementrian

Kesehatan (Kemenkes) dan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. Kebijakan Kemenkes dan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo sangat berpengaruh terhadap kebijakan kesehatan di Kab. Situbondo. Sasaran Indikator Kemenkes dan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo juga merupakan sasaran yang harus dicapai oleh Puskesmas Situbondo Kab. Situbondo. Untuk itu beberapa faktor pendorong dan penghambat yang menyebabkan permasalahan di Puskesmas Situbondo Situbondo terkait Sasaran Kemenkes dan Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.3 Permasalahan Pelayanan Puskesmas Situbondo Kabupaten Situbondo Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Puskesmas Situbondo	Sebagai Faktor	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p><b>Renstra Kementerian Kesehatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penurunan AKI dan AKB</li> <li>2. Penurunan Stunting</li> <li>3. Pemenuhan SDM Kesehatan</li> <li>4. Peningkatan mutu layanan kesehatan</li> <li>5. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer</li> </ol> <p><b>Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penurunan AKI dan AKB</li> <li>2. Penurunan Stunting</li> <li>3. Pemerataan tenaga kesehatan strategis</li> <li>4. Penataan Jaminan Kesehatan Nasional (sistem rujukan)</li> <li>5. Penurunan Penyakit Menular dan Tidak Menular</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih adanya angka kematian ibu dan bayi</li> <li>2. Penurunan angka stunting</li> <li>3. Adanya Pandemi Covid-19</li> <li>4. Angka penyakit tidak menular tinggi (DM dan HT)</li> <li>5. Angka kasus penyakit menular (TB dan HIV/AIDS)</li> <li>6. Sarana dan prasarana yang belum standar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan pembatasan kegiatan luar gedung.</li> <li>2. Adanya pengurangan anggaran</li> <li>3. Adanya program percepatan vaksinasi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbup no.58 th 2011 ttg perubahan kedua perbup no 2 th 2010 ttg system Jamkesda Situbondo</li> <li>2. Perbup No 11 tahun 2014 ttg perubahan peraturan bupati no.8 tahun 2014 ttg pedoman operasional penyelenggara JKN pada PKM dan jaringannya</li> <li>3. Perbup No. 38 th 2015 ttg system rujukan pelayanan kesehatan Situbondo</li> </ol>

<p><b>Renstra Puskesmas Situbondo kabupaten Situbondo:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angka Kematian Ibu dan Bayi yang masih tinggi</li> <li>2. Prevalensi Stunting yang masih tinggi</li> <li>3. Adanya Pandemi Covid 19</li> <li>4. Cakupan ODF ( Open Defecation Free) masih rendah</li> <li>5. Meningkatnya penyakit menular dan tidak menular</li> <li>6. Rendahnya kuantitas tenaga pelayanan Kesehatan (Rasio Dokter, Perawat, Bidan dan tenaga Kesehatan lainnya)</li> <li>7. Standarisasi mutu layanan kesehatan belum maksimal berdasarkan hasil survey IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat )</li> <li>8. Terbatasnya dokter spesialis pada 2 RSUD ( RSUD Besuki dan Asembagus )</li> <li>9. Perilaku masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) khususnya pada masyarakat di pedesaan dan masyarakat dengan status sosial ekonomi menengah ke bawah masih rendah</li> <li>10. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam</li> </ol>			
---	--	--	--

	pembangunan kesehatan.			
--	------------------------	--	--	--

## 2.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Puskesmas Situbondo berada sekitar 1,5 km dari pusat kota. Di kawasan ini dalam radius 2 km terdapat rumah sakit Pemerintah (Rumah Sakit Umum Abdoer Rahem) yang menjadi pusat rujukan dari puskesmas disamping rumah sakit swasta lainnya (RS Elizabeth). Lokasi tempat berdirinya Puskesmas berada di daerah pertokoan dan pemukiman padat penduduk. Selai itu juga Puskesmas Situbondo membawahi 3 Pustu, 3 Ponkesdes dan 3 Poskesdes.

**Tabel 2.4 Permasalahan Pelayanan Puskesmas berdasarkan Analisis RTRW dan KLHS**

No	Hasil RTRW dan KLHS terkait dengan tugas dan fungsi Puskesmas	Permasalahan Pelayanan Puskesmas	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	1. Luas Lahan Puskesmas sempit 2. Pemenuhan sarana dan prasarana 3. Peningkatan IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah) di Puskesmas 4. Pengelolaan sampah medis dan non medis	1. Tempat Parkir tidak ada, sehingga menggunakan bahu jalan 2. Limbah padat medis dan non medis 3. Limbah cair medis dan non medis 4. Polusi gas dan suara	1. Terbatasnya Lahan 2. Terbatasnya anggaran untuk pemenuhan sarana prasarana	1. Pusat pelayanan kesehatan masyarakat dengan biaya yang terjangkau 2. Manajemen puskesmas memiliki kemauan untuk pemenuhan sarana dan prasarana 3. Adanya MOU dengan pihak ketiga terhadap pengelolaan limbah medis dan non medis

## 2.6 Penentuan Isu-isu Strategis/Program Prioritas

Dengan memperhatikan faktor-faktor dari pelayanan OPD, yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Puskesmas Situbondo Kabupaten Situbondo ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Puskesmas Situbondo Kabupaten Situbondo
2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian Kesehatan dan Puskesmas Situbondo Kabupaten Situbondo

3. Implikasi RTRW bagi pelayanan Puskesmas Situbondo Kabupaten Situbondo
4. Implikasi KLHS bagi pelayanan Puskesmas Situbondo Kabupaten Situbondo

Metode penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan cara pembobotan dan penilaian sebagai berikut :

**Tabel 2.5 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis**

No.	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Prov/Kab/Kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggungjawab OPD	10
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25

Berdasarkan penilaian isu-isu strategis berdasarkan skor diatas maka nilai skala dari masing-masing isu strategis yang berkembang di Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6 Nilai Skala Kriteria**

No	Isu Strategi	Nilai Skala Kriteria ke						Total skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Masih adanya angka kematian ibu dan bayi	20	10	20	10	15	25	100
2	Penurunan angka <i>stunting</i>	20	10	20	10	10	20	90
3	Adanya Pandemi Covid-19	20	10	20	10	10	25	95
4	Angka penyakit tidak menular tinggi (DM dan HT)	15	10	15	10	10	20	80
5	Angka kasus penyakit menular (TB dan HIV/AIDS)	10	10	15	10	10	20	75
6	Sarana dan prasarana yang belum standar	15	10	20	10	10	20	85

Berdasarkan metode penentuan prioritas isu strategis pada tabel 2.6 dapat disimpulkan beberapa isu strategis yang akan ditangani adalah :

1. Masih adanya angka kematian ibu dan bayi
2. Penurunan angka *stunting*
3. Angka penyakit tidak menular tinggi (DM dan HT)

## **2.7 Rencana Strategis: Tujuan, Sasaran, Target Indikator Puskesmas Situbondo dan sasaran UPT Puskesmas situbondo**

### **2.7.1 Tujuan dan Sasaran**

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Puskesmas sebagai pelaksana teknis Puskesmas Situbondo maupun sebagai badan layanan umum daerah memiliki tujuan dan sasaran yang sama dengan Puskesmas Situbondo Kabupaten Situbondo yaitu Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

**Tabel 2.7 Target Indikator Tujuan Dan Target Indikator Sasaran Puskesmas Situbondo**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR TUJUAN						SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	IKM Kesehatan	0.759	0.764	0.769	0.774	0.778	0.784	Meningkatnya status Kesehatan Masyarakat & kualitas pelayanan kesehatan Masyarakat	AHH	69	69,05	69,10	69,15	69,20	69,25
									Prosentase Puskesmas yg memiliki nilai IKM >76,6	81%	81%	81.5%	82.5%	82.5%	83.0%
									Prosentase Rumah Sakit yg memiliki nilai IKM >76,6	79.0%	79.0%	79.3%	79.5%	79.7%	80.0%

**Tabel 2.8 Target Indikator Tujuan Dan Target Indikator Sasaran Puskesmas Situbondo**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR TUJUAN						SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR SASARAN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan	IKM Kesehatan	0.759	0.764	0.769	0.774	0.778	0.784	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Prosentase nilai IKM Puskesmas > 76	84,5%	81%	81.5%	82.5%	83%	83.5%

**Gambar 2. 1 Cascading Renstra Puskesmas Situbondo**

<b>MISI</b>	<b>Memabangun Masyarakat Situbondo Sehat, cerdas dan meningkatkan peran Perempuan</b>
<b>TUJUAN</b>	<b>Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan</b>
<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>Indeks Kesehatan</b>
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat &amp; Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat</b>

<b>INDIKATOR SASARAN STRATEGIS</b>	<b>AHH</b>			<b>Prosentase Puskesmas yang Memiliki nilai &gt; 76,6 %</b>
<b>PROGRAM</b>	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
<b>INDIKATOR PROGRAM</b>	1. Prosentase UKM esensial yang tercapai sesuai standart 2. Prosentase UKM Pengembangan yang tercapai sesuai standart 3. Prosentase UKP yang tercapai sesuai standart	Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan SDM Kesehatan ( minimal memiliki 10 jenis tenaga kesehatan) sesuai standart	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri ( PURI )	Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%
<b>KEGIATAN</b>	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan BLUD
<b>INDIKATOR KEGIATAN</b>	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	Jumlah ketersediaan SDM yang di biyai Anggaran BOK Minimal 4 orang	Jumlah Puskesmas yang memiliki ≥ 80 % Posyandu Purnama Mandiri ( PURI )	Jumlah realisasi anggaran BLUD yang terserap
	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standart			
	Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standart			
	Jumlah Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standart			
	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart			

Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Jumlah Pelacakan kasus gizi buruk
Jumlah sasaran rentan gangguan gizi yang mendapatkan intervensi (Gizi kurang, Gizi Buruk dan Bumil KEK)
Jumlah penderita HIV yang mendapatkan penanganan sesuai standart
Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standart
Jumlah Capaian penemuan dan penanganan Penderita Diare sesuai standart
Jumlah penderita Penyakit ISPA yang mendapatkan penanganan sesuai standart
Jumlah penemuan dan penanganan penderita penyakit menular berbasis binatang
Jumlah sasaran masyarakat usia produktif yang mendapatkan layanan skrening faktor risiko PTM
Jumlah Sasaran Masyarakat yang mendapatkan layanan hipertensi (HT) standart
Jumlah Sasaran Masyarakat yang mendapatkan layanan diabetes mellitus (DM)
Jumlah sasaran ODGJ berat yang mendapatkan layanan standart
Jumlah Investigasi (Penyelidikan Epidemiologi Penyakit Yang Berpotensi KLB/Wabah) 80%
Jumlah sasaran Imunisasi Dasar lengkap sesuai target
Jumlah desa/kelurahan yang ODF
Persentase rumah tangga akses terhadap air minum layak (berkualitas)
Jumlah Pos UKK yang dibentuk dan dibina
Jumlah kelompok olahraga yang dibina
Jumlah Desa STBM

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan berkesinambungan yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

**Tabel 3.1 Capaian SPM Puskesmas Situbondo Tahun 2023**

JENIS LAYANAN DASAR	TARGET (%)	Capaian TW 1	Capaian TW 2	Capaian TW 3	Capaian TW 4
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	593	100	187	292	376
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	530	146	270	413	544
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	509	132	264	403	534
Pelayanan Kesehatan Balita	2088	457	1018	1504	2032
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (SD)	4626	247	1896	3852	4671
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (SMP)	3361	1312	2155	2155	3322
Total capaian SD+SMP	7987	1559	4051	6007	7993
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	32420	11524	21540	28268	32625
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	7995	2582	5560	7520	7992
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (USPRO )	8252	1780	5153	7518	8294
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (LANSIA)	2035	504	1048	1376	1462
Total capaian hipertensi Uspro + Lansia	10287	2284	6201	8894	9756
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (USPRO)	863	516	669	693	772
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (LANSIA)	213	290	290	290	290
Total capaian Diabetes Mellitus Uspro + Lansia	1076	806	959	983	1062
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	95	108	225	350	578
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Terduga TB	671	294	455	523	624
Total capaian orang dg resiko terinfeksi HIV (BUMIL + TB)	717	169	315	475	644

**Tabel 3.2 Capaian PKP UKM Esensial Puskesmas Situbondo Tahun 2023**

Indikator UKM Esensial	Target Th 2023	Total Sasaran (ToS)	Target Sasaran (Tx S)	Pencapaian	Riil	Cakupan %
<b>2.1.UKM Esensial</b>						
<b>2.1.1.Upaya Promosi Kesehatan</b>						<b>78.82</b>
<b>2.1.1.1 Pengkajian PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)</b>						100.00
1. Rumah Tangga yang dikaji	20%	17955	3.591	3.635	20.25%	100.00
2. Institusi Pendidikan yang dikaji	50%	54	27	27	50.00%	100.00
3. Pondok Pesantren ( Ponpes) yang dikaji	70%	6	4	5	83.33%	100.00
<b>2.1.1.2.Tatanan Sehat</b>						90.24
1.Rumah Tangga Sehat yang memenuhi 10 indikator PHBS	55%	3.591	1.975	1.397	38.90%	70.73
2. Institusi Pendidikan yang memenuhi 7-9 indikator PHBS (klasifikasi IV)	74%	27	20	21	77.78%	100.00
3.Pondok Pesantren yang memenuhi 13-15 indikator PHBS Pondok Pesantren (Klasifikasi IV)	50%	4	2	4	100.00%	100.00
<b>2.1.1.3.Intervensi/ Penyuluhan</b>						60.47
1. Kegiatan intervensi pada Kelompok Rumah Tangga	100%	260	260	48	18.46%	18.46
2. Kegiatan intervensi pada Institusi Pendidikan	100%	27	27	17	62.96%	62.96
3. Kegiatan intervensi pada Pondok Pesantren	100%	4	4	8	200.00%	100.00
<b>2.1.1.4.Pengembangan UKBM</b>						100.00
1. Posyandu Balita PURI (Purnama Mandiri)	76%	65	49	56	86.15%	100.00
2. Poskesdes/poskeskel aktif	78%	6	5	6	100.00%	100.00
<b>2.1.1.5 Pengembangan Desa Siaga Aktif</b>						66.67
1.Des/kelurahan Siaga Aktif	98.3%	6	6	6	100.00%	100.00
2.Des/kelurahan Siaga Aktif PURI ( Purnama Mandiri )	17.5%	6	1	-	0.00%	0.00
3.Pembinaan Desa/kelurahan Siaga Aktif	100%	12	12	24	200.00%	100.00
<b>2.1.1.6. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>						55.56
1.Promosi kesehatan untuk program prioritas di dalam gedung Puskesmas dan jaringannya (Sasaran masyarakat )	100%	9	9	1	11.11%	11.11
2 Pengukuran dan Pembinaan tingkat perkembangan UKBM	100%	93	93	93	100.00%	100.00
<b>2.1.2. Upaya Kesehatan Lingkungan</b>						<b>90.00</b>
<b>2.1.2.1.Penyehatan Air</b>						100.00
1. Inspeksi Kesehatan Lingkungan Sarana Air Minum (SAM)	50%	7	4	6	85.71%	100.00
2. Sarana Air Minum (SAM) yg memenuhi syarat kesehatan	90%	6	5	6	100.00%	100.00
3. Sarana Air Minum (SAM) yang diperiksa kualitas airnya	72%	6	4	6	100.00%	100.00
4. Sarana Air Minum (SAM) yang memenuhi syarat	15%	6	1	5	83.33%	100.00

<b>2.1.2.2. Penyehatan Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)</b>							100.00
1.	Pembinaan Tempat Pengelolaan Pangan ( TPP )	68%	103	70	73	70.87%	100.00
2.	TPP yang memenuhi syarat kesehatan	55%	73	40	59	80.82%	100.00
<b>2.1.2.3. Pembinaan Tempat Fasilitas Umum ( TFU )</b>							100.00
1.	Pembinaan sarana TFU prioritas	80%	48	38	47	97.92%	100.00
2.	TFU prioritas yang memenuhi syarat kesehatan	30%	47	14	38	80.85%	100.00
<b>2.1.2.4. Yankesling (Klinik Sanitasi)</b>							83.33
1.	Konseling Sanitasi	10%	1.020	102	148	14.51%	100.00
2.	Inspeksi Sanitasi PBL	20%	148	30	50	33.78%	100.00
3.	Intervensi terhadap pasien PBL yang di IS	40%	50	20	10	20.00%	50.00
<b>2.1.2.5. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ( STBM ) = Pemberdayaan Masyarakat</b>							66.67
	Desa/kelurahan yang Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	90%	6	5	6	100.00%	100.00
	Desa/ Kelurahan Implementasi STBM 5 Pilar	30%	6	2	6	100.00%	100.00
	Desa/ Kelurahan ber STBM 5 Pilar	15%	6	1	-	0.00%	0.00
<b>2.1.3 Upaya Pelayanan Kesehatan Ibu , Anak dan Keluarga Berencana</b>							<b>94.29</b>
<b>2.1.3.1. Kesehatan Ibu</b>							100.00
1	Kunjungan Pertama Ibu Hamil (K1)	100%	593	593	594	100.17%	100.00
2	Pelayanan Persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan (Pf)	100%	530	530	544	102.64%	100.00
3	Pelayanan Nifas oleh tenaga kesehatan (KF)	92%	530	488	522	98.49%	100.00
4	Penanganan komplikasi kebidanan (PK)	80%	119	95	113	94.96%	100.00
5	Ibu hamil yang diperiksa HIV	95%	594	564	594	100.00%	100.00
<b>2.1.3.2. Kesehatan Bayi</b>							94.53
1.	Pelayanan Kesehatan neonatus pertama ( KN1)	100%	509	509	550	108.06%	100.00
2.	Pelayanan Kesehatan Neonatus 0 - 28 hari (KN lengkap)	100%	509	509	534	104.91%	100.00
3.	Penanganan komplikasi neonatus	80%	101	81	79	78.22%	97.77
4.	Pelayanan kesehatan bayi 29 hari - 11 bulan	92%	537	494	397	73.93%	80.36
<b>2.1.3.3. Kesehatan Anak Balita dan Anak Prasekolah</b>							98.66
1.	Pelayanan kesehatan balita (0 - 59 bulan)	100%	2.088	2.088	2.032	97.32%	97.32
2.	Pelayanan kesehatan Anak pra sekolah (60 - 72 bulan)	84%	665	559	579	87.07%	100.00
<b>2.1.3.4. Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja</b>							83.94
1.	Sekolah setingkat SD/MI/SDLB yang melaksanakan pemeriksaan penjangkaran kesehatan	100%	33	33	33	100.00%	100.00
2.	Sekolah setingkat SMP/MTs/SMPLB yang melaksanakan pemeriksaan penjangkaran kesehatan	100%	13	13	13	100.00%	100.00
3.	Sekolah setingkat SMA/MA/SMK/SMALB yang melaksanakan	100%	8	8	8	100.00%	100.00

pemeriksaan penjarangan kesehatan							
4.Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar kelas 1 sampai dengan kelas 9 dan di luar satuan pendidikan dasar	100%	7.987	7.987	7.993	100.08%	100.00	
5. Pelayanan kesehatan remaja	100%	9.813	9.813	1.934	19.71%	19.71	
<b>2.1.3.5. Pelayanan Kesehatan Lansia</b>							<b>96.63</b>
1.Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (usia ≥ 60 tahun )	100%	7.995	7.995	7.992	99.96%	99.96	
2. Pelayanan Kesehatan pada Pra usia lanjut (45-59 tahun)	100%	11.249	11.249	10.494	93.29%	93.29	
<b>2.1.3.6. Pelayanan Keluarga Berencana (KB)</b>							91.96
1.KB aktif (Contraceptive Prevalence Rate/ CPR)	70%	8.507	5.955	7.000	82.29%	70.00	
2. Peserta KB baru	10%	8.507	851	738	8.68%	86.75	
3. Akseptor KB Drop Out (< 10%)	10%	5.931	593	572	9.64%	100.00	
4. Peserta KB mengalami komplikasi (< 3.5%)	3.49%	5.931	207	-	0.00%	100.00	
5. PUS dengan 4 T ber KB	80%	2.528	2.022	2.000	79.11%	98.89	
6. KB pasca persalinan	60%	530	318	280	52.83%	88.05	
7. CPW di layanan kespro Catin	65%	334	217	268	80.24%	100.00	
<b>2.1.4.Upaya Pelayanan Gizi</b>							<b>93.37</b>
<b>2.1.4.1.Pelayanan Gizi Masyarakat</b>							99.11
1.Pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi pada balita (6-59 bulan)	89%	2.625	2.336	3.160	120.38%	100.00	
2.Pemberian 90 tablet Besi pada ibu hamil	83%	593	492	479	80.78%	97.32	
3.Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri	56%	3.713	2.079	3.151	84.86%	100.00	
<b>2.1.4.2. Penanggulangan Gangguan Gizi</b>							100.00
1.Pemberian makanan tambahan bagi balita gizi kurang	85%	433	368	428	98.85%	100.00	
2.Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK )	80%	71	57	67	94.37%	100.00	
3. Balita gizi buruk mendapat perawatan sesuai standar tatalaksana gizi buruk	88%	7	6	7	100.00%	100.00	
4. Pemberian Proses Asuhan Gizi di Puskesmas (sesuai buku pedoman asuhan gizi tahun 2018 warna kuning ): 12 Dokumen	100%	12	12	12	100.00%	100.00	
<b>2.1.4.3. Pemantauan Status Gizi</b>							81.00
1.Balita yang di timbang berat badanya ( D/S)	80%	2.625	2.100	1.711	65.18%	81.47	
2.Balita ditimbang yang naik berat badannya (N/D)	86%	1.408	1.211	763	54.20%	63.02	
3.Balita stunting ( pendek dan sangat pendek )	16.00%	1.689	270	283	16.76%	75.00	
4. Bayi usia 6 (enam) bulan mendapat ASI Eksklusif	50%	497	249	372	74.85%	100.00	
5. Bayi yg baru lahir mendapat IMD (Inisiasi Menyusu Dini)	66%	550	363	354	64.36%	97.52	
6. Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) (< 11,5%)	11.5%	597	69	78	13.07%	50.00	
7. Rumah Tangga mengkonsumsi garam beryodium	88%	220	194	220	100.00%	100.00	

<b>2.1.5.Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</b>						<b>93.26</b>
<b>2.1.5.1. Diare</b>						99.62
Pelayanan Diare Balita	100%	443	443	438	98.87%	98.87
Cakupan Pemberian Oralit dan Zinc pd Penderita Diare Balita	100%	438	438	438	100.00%	100.00
Pelaksanaan kegiatan Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA)	100%	438	438	438	100.00%	100.00
<b>2.1.5.2. Pencegahan dan Penanggulangan Hepatitis B pada Ibu Hamil</b>						100.00
Deteksi Dini Hepatitis B pada Ibu Hamil	100%	593	593	595	100.34%	100.00
Tatalaksana bu Hamil dengan Hepatitis B Reaktif	100%	10	10	10	100.00%	100.00
<b>2.1.5.3. ISPA ( Infeksi Saluran Pernapasan Atas)</b>						100.00
cakupan Penemuan penderita Pneumonia balita	75%	117	88	148	126.50%	100.00
Penderita kasus pneumonia yang diobati sesuai standart	70%	117	82	148	126.50%	100.00
<b>2.1.5.4.Kusta</b>						100.00
Pemeriksaan kontak dari kasus Kusta baru (>80%)	80.0%	100	80	95	95.00%	100.00
RFT penderita Kusta (>90%)	90.1%	3	3	3	100.00%	100.00
Proporsi tenaga kesehatan Kusta tersosialisasi (>95%)	95.1%	21	20	35	166.67%	100.00
Kader Posyandu yang telah mendapat sosialisasi kusta (>95%)	95.1%	100	95	260	260.00%	100.00
SD/ MI telah dilakukan screening Kusta	100.0%	30	30	60	200.00%	100.00
<b>2.1.5.5.Tuberculosis Bacillus (TB) Paru</b>						91.58
Kasus TBC yang ditemukan dan diobati ≥81%	81%	124	100	69	55.65%	68.70
Persentase Pelayanan orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	671	671	806	120.12%	100.00
Angka Keberhasilan pengobatan kasus TBC ( Success Rate/SR) ≥90%	90%	83	75	73	87.95%	97.62
Persentase pasien TBC dilakukan Investigasi Kontak ≥90%	90%	69	62	69	100.00%	100.00
<b>2.1.5.6.Pencegahan dan Penanggulangan PMS dan HIV/AIDS</b>						100.00
Sekolah (SMP dan SMA/ sederajat) yang sudah dijangkau penyuluhan HIV/AIDS	100%	16	16	16	100.00%	100.00
Orang yang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV	100%	644	644	644	100.00%	100.00
<b>2.1.5.7. Demam Berdarah Dengue (DBD)</b>						100.00
Angka Bebas Jentik (ABJ) (>95%)	95.1%	1.800	1.712	6.167	342.61%	100.00
Penderita DBD ditangani	100%	14	14	19	135.71%	100.00
PE kasus DBD	100%	14	14	19	135.71%	100.00
<b>2.1.5.8. Malaria</b>						-
Penderita Malaria yang dilakukan pemeriksaan SD	100%	1	1	-	0.00%	0.00
Penderita positif Malaria yang diobati sesuai standar (ACT)	100%	1	1	-	0.00%	0.00
Penderita positif Malaria yang di follow up	100%	1	1	-	0.00%	0.00
<b>2.1.5.9. Pencegahan dan Penanggulangan Rabies</b>						-

Cuci luka terhadap kasus gigitan HPR	100%	1	1	1	100.00%	100.00
Vaksinasi terhadap kasus gigitan HPR yang berindikasi	100%	1	1	1	100.00%	100.00
<b>2.1.5.10. Pelayanan Imunisasi</b>						92.51
Persentase bayi usia 0 - 11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	100%	537	537	483	89.94%	89.94
UCI desa	100%	6	6	5	83.33%	83.33
Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat antigen baru	100%	537	537	378	70.39%	70.39
Persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan baduta	100%	595	595	529	88.91%	88.91
Persentase anak yang mendapatkan imunisasi lanjutan lengkap di usia sekolah dasar	80%	748	598	740	98.93%	100.00
Persentase wanita usia subur yang memiliki status imunisasi T2+	80%	593	474	594	100.17%	100.00
Pemantauan suhu, VVM, serta Alarm Dingin pada lemari es penyimpanan vaksin	100%	12	12	12	100.00%	100.00
Ketersediaan buku catatan stok vaksin sesuai dengan jumlah vaksin program imunisasi serta pelarutnya	100%	12	12	12	100.00%	100.00
Laporan KIPI Zero reporting / KIPI Non serius dan KIPI serius	90%	12	11	12	100.00%	100.00
<b>2.1.5.11. Pengamatan Penyakit (Surveillance Epidemiology)</b>						100.00
Laporan STP yang tepat waktu ( $\geq 80\%$ )	80%	12	10	12	100.00%	100.00
Kelengkapan laporan STP ( $\geq 90\%$ )	90%	12	11	12	100.00%	100.00
Laporan MR01 tepat waktu ( $\geq 80\%$ )	80%	12	10	12	100.00%	100.00
Kelengkapan laporan MR01 ( $\geq 90\%$ )	90%	12	11	12	100.00%	100.00
Ketepatan Laporan W2 (format SKDR) $\geq 80\%$	80%	52	42	48	92.31%	100.00
Kelengkapan laporan W2 (format SKDR) $\geq 90\%$	90%	52	47	52	100.00%	100.00
Persentase Alert yang direpson peringatan ini KLB/Wabah (alert systems) minimal 80% di Puskesmas ( $>90\%$ )	90%	22	20	22	100.00%	100.00
Desa/ Kelurahan yang mengalami KLB ditanggulangi dalam waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam	100%	1	1	1	1	100.00
Persentase kabupaten/kota yang memiliki peta risiko penyakit infeksi emerging	15%	3	0	3	100.00%	100.00
Deteksi dini penemuan suspek campak rubela	100%	2	2	14	700.00%	100.00
Deteksi dini penemuan AFP	100%	1	1	1	100.00%	100.00
<b>2.1.5.12. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular</b>						77.32
Fasyankes yang ada di wilayah Puskesmas melaksanakan KTR	100%	17	17	17	100.00%	100.00
Sekolah yang ada di wilayah Puskesmas melaksanakan KTR	100%	54	54	46	85.19%	85.19
Tempat Anak Bermain yang ada di wilayah Puskesmas melaksanakan KTR	100%	28	28	12	42.86%	42.86

	Persentase merokok penduduk usia 10 - 18 tahun (<8,8%)	8.8%	9.800	862	205	2.09%	100.00
	Puskesmas menyelenggarakan layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM)	100%	<b>1</b>	1	1	100.00%	100.00
	Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	100%	<b>32420</b>	32.420	32.583	100.50%	100.00
	Deteksi Dini Penyakit Hipertensi	70%	<b>39264</b>	27.485	40.580	103.35%	100.00
	Deteksi Dini Obesitas	70%	<b>39264</b>	27.485	40.580	103.35%	100.00
	Deteksi Dini Penyakit Diabetes Melitus	70%	<b>22993</b>	16.095	17.996	78.27%	100.00
	Deteksi Dini Stroke	70%	<b>2601</b>	1.821	7.582	291.50%	100.00
	Deteksi Dini Penyakit Jantung	70%	<b>2601</b>	1.821	72	2.77%	3.95
	Deteksi Dini Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK)	70%	<b>22993</b>	16.095	355	1.54%	2.21
	Deteksi Dini Kanker Payudara	70%	<b>4902</b>	3.431	4.311	87.94%	100.00
	Deteksi Dini Kanker Leher Rahim	70%	<b>4902</b>	3.431	98	2.00%	2.86
	Deteksi Dini Gangguan Indera	70%	<b>46081</b>	32.257	32.257	70.00%	100.00
	Prosentase Penderita TB yang diperiksa Gula darahnya	100%	<b>69</b>	69	69	100.00%	100.00
	<b>2.1.5.13 Pelayanan Kesehatan Jiwa</b>			-			<b>64.82</b>
1	Persentase penduduk usia ≥ 15 tahun dengan risiko masalah kesehatan jiwa yang mendapatkan skrining	60%	9.816	5.890	1.159	11.81%	19.68
2	Persentase penyandang gangguan jiwa yang memperoleh layanan di Fasyankes	60%	324	194	77	23.77%	39.61
3	Jumlah kunjungan pasien pasung	100.00%	1	1	1	100.00%	100.00
4	Persentase kasus pasung yang dilepaskan/dibebaskan	10%	1	0	1	100.00%	100.00
	<b>2.1.6 Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat ( Perkesmas)</b>						<b>50.87</b>
1	Keluarga binaan yang mendapatkan asuhan keperawatan	60%	7.111	4.267	1.897	26.68%	44.46
2	Keluarga yang dibina dan telah Mandiri/ memenuhi kebutuhan kesehatan	40%	4.267	1.707	759	17.78%	44.46
3	Kelompok binaan yang mendapatkan asuhan keperawatan	50%	110	55	8	7.27%	14.55
4	Desa/kelurahan binaan yang mendapatkan asuhan keperawatan	30%	6	2	2	33.33%	100.00
	TOTAL NILAI KINERJA UKM ESSENSIAL (I- V)						83.43

**Tabel 3.3 Capaian PKP UKM Pengembangan Puskesmas Situbondo Tahun 2023**

Indikator UKM Pengembangan		Target Th 2023	Total Sasaran (ToS)	Target Sasaran (Tx S)	Pencapaian	Riil	Cakupan
<b>2.2.1. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat</b>							<b>100.00</b>
	1. PAUD dan TK yang mendapat penyuluhan/pemeriksaan gigi dan mulut	55%	28	15	18	64.29%	100.00
	2. Kunjungan ke Posyandu terkait kesehatan gigi dan mulut	30%	92	28	28	30.43%	100.00
<b>2.2.2. Penanganan Masalah Penyalahgunaan Napza</b>							100.00

1	Penyediaan dan penyebaran informasi tentang pencegahan & penanggulangan bahaya penyalahgunaan Napza	10%	54	5	16	29.63%	100.00
<b>2.2.3. Kesehatan Matra (Pencegahan dan Imunisasi)</b>							<b>100.00</b>
1	Hasil pemeriksaan kesehatan jamaah haji 3 bulan sebelum operasional terdata.	100%	71	71	71	100.00%	100.00
<b>2.2.4. Pelayanan Kesehatan Tradisional</b>							<b>89.52</b>
1	Penyehat Tradisional yang memiliki STPT	25%	42	11	5	11.90%	47.62
2	Panti Sehat berkelompok yang berijin	15%	2	0	-	0.00%	-
3	Pembinaan Penyehat Tradisional	50%	42	21	21	50.00%	100.00
4	Kelompok Asuhan Mandiri yang terbentuk	20%	2	0	2	100.00%	100.00
5	Kelompok Asuhan Mandiri yang mendukung Program Prioritas (1 kelompok)	1	1	1	2	200.00%	100.00
6	Kelompok Asuhan Mandiri Sekolah yang terbentuk	1	1	1	1	100.00%	100.00
<b>2.2.5. Pelayanan Kesehatan Olahraga</b>							<b>88.89</b>
1	Kelompok /klub olahraga yang dibina	40%	58	23	46	79.31%	100.00
2	Pengukuran Kebugaran Calon Jamaah Haji	90%	20	18	20	100.00%	100.00
3	Puskemas menyelenggarakan pelayanan kesehatan Olahraga internal	30%	12	4	2	16.67%	55.56
4	Pengukuran kebugaran Anak Sekolah	35%	30	11	33	110.00%	100.00
<b>2.2.6. Pelayanan Kesehatan Kerja</b>							<b>95.83</b>
1	Puskesmas menyelenggarakan K3 Puskesmas (internal)	50%	12	6	5	41.67%	83.33
2	Puskesmas menyelenggarakan pembinaan K3 perkantoran	50%	7	4	4	57.14%	100.00
3	Promotif dan preventif yang dilakukan pada kelompok kesehatan kerja informal	50%	72	36	39	54.17%	100.00
4	Jumlah pembentukan Pos UKK baru	10%	1	0	1	100.00%	100.00
<b>2.2.7 Kefarmasian</b>							<b>100.00</b>
<b>2.2.7.1 Edukasi dan Pemberdayaan masyarakat tentang obat pada Gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat</b>							100.0
1	Kader aktif pada kegiatan Edukasi dan Pemberdayaan masyarakat tentang obat pada Gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat	25%	20	5	20	100.00%	100
2	Jumlah wilayah yang dilakukan Kegiatan Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat	25%	6	2	2	33.33%	100.00
3	Jumlah masyarakat yang telah tersosialisasikan gema cermat	25%	6	2	2	33.33%	100.00
<b>2.2.7.2 PEMBINAAN TEMPAT PRODUKSI SARANA INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN</b>							100.00
1	JUMLAH SARANA IRTP YANG TELAH MENDAPATKAN IJIN EDAR PIRT	25%	50	13	13	26.00%	100.00
							96.32

**Tabel 3.4 Capaian PKP UKP Puskesmas Situbondo Tahun 2023**

No	Indikator	Target TH 2023	Total Sasaran	Target Sasaran	Pencapaian	Riil	Cakupan
<b>2.3.1. Pelayanan Non Rawat Inap</b>							<b>75.82</b>
1	Angka Kontak Komunikasi ( $\geq 150$ per mil)	15%	23477	3522	3271	13.93%	25.00
2	Rasio Rujukan Rawat Jalan Non Spesialistik (RRNS)	2%	250	5	1	0.33%	100.00
3	Rasio Peserta Prolanis Terkendali (RPPT)	5%	100	5	87	87.34%	100.00
4	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi ( <b>Standar Pelayanan Minimal ke 8</b> )	100%	10287	10287	9756	94.84%	94.84
5	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus ( <b>Standar Pelayanan Minimal ke 9</b> )	100%	1076	1076	1062	98.70%	98.70
6	Persentase Penyandang Hipertensi Yang Tekanan Darahnya Terkendali	63%	10287	6481	193	1.88%	2.98
7	Persentase Penyandang Diabetes Melitus Yang Gula Darahnya Terkendali	58%	1076	624	78	7.25%	12.50
8	Rasio gigi tetap yang ditambah terhadap gigi tetap yang dicabut ( <b>PTM</b> ) ( $>1$ )	100%	1	1	1.57	157%	100.00
9	Bumil yang mendapat pelayanan kesehatan gigi ( <b>PTM</b> )	100%	533	533	533	100.00%	100.00
10	Kelengkapan pengisian rekam medik	100%	15999	15999	15999	100.00%	100.00
11	10.Pelayanan konseling gizi ( <b>Kesgamas</b> )	5%	13333	667	779	5.84%	100.00
<b>2.3.2. Pelayanan Gawat Darurat</b>							-
1	Kelengkapan pengisian <i>informed consent</i>	100%	13	13	0	0.00%	0.00
<b>2.3.3. Pelayanan Kefarmasian</b>							<b>90.97</b>
1	Kesesuaian item obat yang tersedia dalam Fornas	80%	1655	1324	128	7.72%	9.66
2	Ketersediaan obat terhadap 40 item obat indikator	85%	480	408	480	100.00%	100.00
3	Ketersediaan 5 item vaksin indikator	100%	60	60	60	100.00%	100.00
4	Penggunaan antibiotika pada penatalaksanaan ISPA non pneumonia ( $\leq 20\%$ )	20%	25	5	0	0.00%	100.00
5	Penggunaan antibiotika pada penatalaksanaan kasus diare non spesifik ( $\leq 8\%$ )	8%	5	0	0	0.00%	100.00

6	Penggunaan Injeksi pada Myalgia ( $\leq 1\%$ )	1%	9	0	0	0.00%	100.00
7	Rerata item obat yang diresepkan ( $\leq 2,6$ )	2.6	4.00	10.40	26.15	2.18%	100.00
8	Pengkajian resep, pelayanan resep dan pemberian informasi obat	80%	6.364	5091	8530	134.04%	100.00
9	Konseling	5%	1.000	50	65	6.50%	100.00
10	Pelayanan Informasi Obat	80%	12	10	12	100.00%	100.00
<b>2.3.4. Pelayanan laboratorium</b>							<b>100.00</b>
1	Kesesuaian jenis pelayanan laboratorium dengan standar	60%	50	30	46	92.00%	100.00
2	Ketepatan waktu tunggu penyerahan hasil pelayanan laboratorium	100%	4066	4066	4066	100.00%	100.00
3	Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu internal (PMI)	100%	210	210	210	100.00%	100.00
<b>2.3.5. Pelayanan Rawat Inap</b>							-
1	<i>Bed Occupation Rate</i> (BOR) (10-60%)	60%	365	1095	0	0.00%	0.00
2	Kelengkapan pengisian rekam medik rawat inap dalam 24 jam	100%	207	207	0	0.00%	0.00
<b>2.3.6. Pelayanan Kesehatan Rujukan</b>							<b>100.00</b>
1	Penerapan Rujukan Klaster	100%	3114	3114	3114	100.00%	100.00
2	Pemanfaatan Sisrute dalam Rujukan	50%	8	4	7	87.50%	100.00
<b>TOTAL NILAI KINERJA UKP (I-VI)</b>							<b>0.00</b>
<b>TOTAL NILAI KINERJA UKP RAWAT JALAN (I-VI)</b>							<b>91.70</b>

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

1. Dari seluruh uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara umum UPT Puskesmas Situbondo telah memperlihatkan pencapaian sasaran sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategisnya;
2. Indikator Kinerja pada tahun 2023 Sebanyak 2 indikator Kinerja, yaitu capaian nilai SPM 96,79% dan capaian PKP 91,99%
3. Faktor Penghambat yang ditemukan dalam pencapaian sasaran pada umumnya diantaranya adalah Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat kurang, Kesadaran dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, koordinasi lintas program dan lintas sektor belum maksimal, Sumber daya manusia yang masih kurang sehingga banyak petugas yang merangkap program, keterbatasan kemampuan sumber daya dalam manajemen program/kegiatan, baik dalam hal pencatatan/pelaporan maupun pelaksanaan program/kegiatan.

### **4.2 Saran**

1. Langkah penting sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, antara lain Perencanaan program hendaknya dilakukan secara menyeluruh, sehingga program dan kegiatan yang dihasilkan dapat lebih mendukung pada pencapaian sasaran, tujuan dan visi, misi. Perlu dibedakan Strategi yang bersifat Kebijakan atau Regulasi dengan yang bersifat teknis, sehingga ada pembagian kewenangan didalam pelaksanaan;
2. Peningkatan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait sebagai dukungan pelaksanaan program dan kegiatan;.
3. Peningkatan kualitas sumber daya kesehatan melalui pendidikan pelatihan, maupun pembinaan langsung pada masing-masing pemegang program Puskesmas Situbondo.